

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi di Indonesia telah dimulai dari beberapa tahun ke belakang dimana telah merambah hampir semua bidang kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dibentuklah Otonomi Daerah yang menciptakan suasana baru, yaitu menggantikan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang pada awalnya sentralistik menjadi desentralistik. Tidak seperti negara lain yang memberikan otonomi kepada Negara Bagian atau Provinsi. Indonesia memberikan otonomi bahkan pada unit pemerintahan yang lebih kecil, seperti pada Kabupaten/Kota.

Demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak serasi lagi dengan perkembangan situasi, tuntutan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan aspek ketatanegaraan sehingga perlu adanya perubahan. Perubahan tersebut ialah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (telah diubah dengan revisi pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan revisi kedua pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) menyebabkan adanya perubahan yang terjadi pada manajemen keuangan daerah.

Perubahan tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya, yaitu dengan adanya pendelegasian berbagai wewenang serta urusan kepada pemerintah daerah

akan membuat semakin kompleksnya tata kelola keuangan daerah, serta tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan *good governance* dengan menuntut adanya perubahan prinsip-prinsip dan perubahan paradigma manajemen keuangan daerah, baik pada tahap rencana anggaran, pelaksanaan, maupun pada pertanggungjawabannya (Putri, 2013). Sehingga dalam mengelola keuangan daerah harus secara akuntabilitas dan transparan.

Organisasi sektor publik termasuk dalam suatu bagian sistem perekonomian negara dalam mewujudkan terciptanya kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Contoh organisasi masyarakat diantaranya institusi pemerintahan, sekolah, partai politik, rumah sakit dan sebagainya (Nugraha, 2016). Memproduksi barang-barang publik merupakan tujuan dari organisasi sektor publik. Ada halnya yang dinamakan dengan organisasi sektor swasta, antara keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Suatu entitas yang melaksanakan aktivitasnya yang erat kaitannya dengan sebuah usaha untuk menghasilkan barang ataupun jasa publik dan hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan publik merupakan penjelasan mengenai organisasi sektor publik berdasarkan perspektif ekonomi (Nurillah, 2014). Pada dasarnya pelayanan terhadap masyarakat merupakan tujuan utama dari organisasi publik. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja merupakan faktor kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. terdapat upaya dalam peningkatan akuntabilitas bisa diaplikasikan dengan menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja.

Beberapa fenomena nyata di kalangan organisasi sektor publik yang ada di Indonesia secara tidak langsung mengarah pada meningkatnya tuntutan

pertanggungjawaban pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah pada organisasi publik. Akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang sifatnya wajib untuk melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya, dan harus dikerjakan secara berkala (Mardiasmo, 2009).

Salah satu strategi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan salah satu peraturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah. Bentuk akuntabilitas yang paling mendasar di sektor publik adalah adanya laporan keuangan. Sebagai sebuah bentuk pertanggungjawabannya maka pemerintah sebagai entitas pelapor harus menyusun laporan keuangan dengan ketentuan harus disajikan serta disusun searah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sebuah informasi yang dirancang guna menggambarkan kondisi era kinerja keuangan pada suatu organisasi merupakan pengertian dari laporan keuangan. Semakin tinggi mutu laporan yang disajikan, juga akan makin meyakinkan pandangan tentang kinerja keuangan instansi oleh pihak luar atau eksternal. Menurut Sofyan Assauri (2000) laporan keuangan adalah laporan tentang pertanggungjawaban untuk manajemen sumber daya yang didelegasikan. Laporan keuangan berisikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu

perusahaan. Adapun dalam laporan keuangan berisikan dari komponen-komponen, diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Fahmi, 2020).

Pemerintah harus menyusun pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Pelaporan keuangan yang baik menunjukkan adanya kinerja yang baik pula. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Aziz et al., 2018).

Kinerja organisasi publik harus diukur untuk menunjukkan bagaimana organisasi publik tersebut melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja dapat bisa dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dan ditindaklanjuti dengan melihat laporan keuangan yang dibuat secara rutin pada akhir periode. Sementara indikator kinerja non-keuangan yaitu dapat dilaksanakan dengan menilai/mengevaluasi seberapa baik dan sejauh mana organisasi publik dapat mencapai tujuan yang menjadi target dan sejauh mana masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik tersebut (Bastian, 2020).

Sistem pengendalian intern memegang peranan yang penting dalam pengelolaan keuangan negara. Maka dari itu, untuk meningkatkan kinerja salah satunya dengan meningkatkan sistem pengendalian internal. Dengan cara ini keuangan publik dapat digunakan secara terbuka, efektif, serta efisien (Hidayati & Dianawati, 2017).

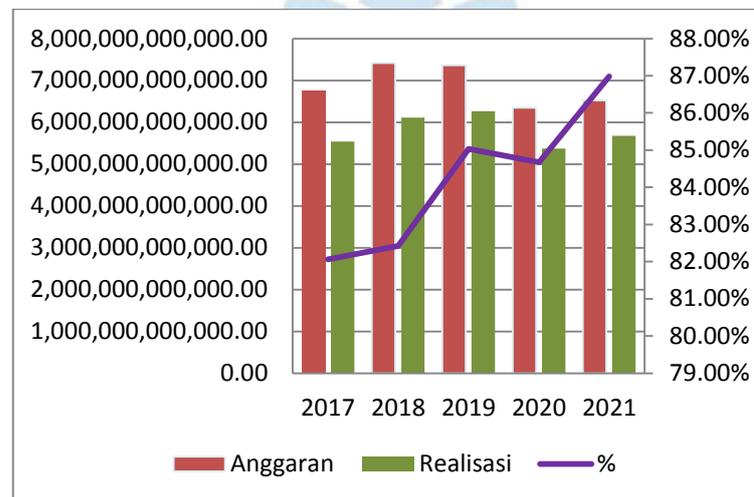
Mahmudi (2009) menjelaskan bahwa suatu proses integral pada tindakan serta aktivitas yang dilaksanakan secara berkala oleh pimpinan beserta jajarannya dalam memberikan kepercayaan terhadap dalam pencapaian tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan dalam melaporkan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan secara efisien dan efektif merupakan pengertian dari sistem pengendalian intern. Oleh karena itu dalam rangka terciptanya keterbukaan dan tanggung jawab terhadap publik, sistem pengendalian ini dikira dapat memberantas masalah-masalah yang berhubungan terkait pelaporan dan pengawasan (Firmansyah & Sinambela, 2021). Adapun yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern di pemerintah pusat maupun daerah yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Lokus dari penelitian yang dilakukan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung. BKAD Kota Bandung merupakan badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan. Yang mana menurut pada Peraturan Walikota Nomor 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tupoksi, serta Tata Kerja menjelaskan bahwa BKAD adalah unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan pekerjaan umum dalam bidang keuangan. Sehingga kinerjanya harus diperhatikan. Salah satu indikator kinerja yang baik dapat dilihat dalam laporan keuangan tahunannya.

Fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan satu- hal yang menarik untuk dikaji serta dilakukan penelitian. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2018

hingga sekarang termasuk satu dari beberapa laporan pemerintahan daerah lainnya yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara, pada tahun 2016 hingga 2017 masih memegang opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu penggunaan anggaran Pemerintah Kota Bandung tidak stabil. Yang mana bisa dilihat dari penyerapan anggaran Kota Bandung yang masih rendah. Berikut disajikan dengan grafik di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung (data diolah penulis)

Gambar 1. 1 Penyerapan Anggaran Kota Bandung TA 2017-2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa penyerapan anggaran Kota Bandung masih rendah selama rentang lima tahun kebelakang, terhitung dari tahun 2017 hingga 2021. Dimana setiap tahunnya realisasi anggaran tersebut belum mencapai 100%. Adapun rincian dari anggaran yang telah direncanakan, realisasi, serta selisih antara keduanya yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Selisih Realisasi Anggaran Total Belanja Kota Bandung TA 2017 -
2021**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians (Selisih)	Persentase (%)
2017	6,752,914,685,771.00	5,541,718,107,062.75	(1,211,196,578,708.25)	82.06%
2018	7,418,332,448,642.00	6,114,449,093,123.40	(1,303,883,355,518.60)	82.42%
2019	7,365,410,780,008.01	6,262,486,208,359.67	(1,102,924,571,648.34)	85.03%
2020	6,346,999,756,908.28	5,374,019,732,054.00	(972,980,024,854.28)	84.67%
2021	6,525,381,024,968.00	5,675,599,520,638.20	(849,781,504,329.80)	86.98%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas, berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran dalam APBD Kota Bandung terlihat adanya ketidakefektifan dalam penyerapannya. Jika dibandingkan antara besarnya anggaran dengan realisasi total belanja, maka terdapat selisih (varian) yang beragam setiap tahunnya.

Hal tersebut juga dapat terlihat dari pola penyerapan anggaran pada LRA Kota Bandung yang cenderung menumpuk di akhir periode anggaran. Beberapa SKPD belum mampu merealisasikan kegiatannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perencanaan kegiatan yang lemah dikarenakan kurang siapnya satuan kerja dalam menyusun rancangan anggaran menyebabkan penyerapan anggaran pun kurang optimal. Lemahnya perencanaan kegiatan yang dibuat karena kurang

siapnya satuan kerja dalam menyusun rancangan anggaran yang menyebabkan penyerapan anggaran pun kurang optimal.

Anggaran yaitu pernyataan mengenai perkiraan kinerja yang hendak dicapai pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam metrik keuangan (Mardiasmo, 2009). Kurang optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh berbagai hambatan yang dihadapi SKPD, contohnya dalam pelaksanaan kegiatan adanya sistem pengendalian intern yang kurang optimal. Hambatan lainnya adalah kualitas SDM, contohnya terdapat beberapa pegawai satuan kerja yang tidak melaksanakan amanahnya sesuai tanggung jawabnya yang mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan tidak landing di waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fenomena lainnya yaitu pada laporan hasil pemeriksaan yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 menunjukkan bahwa pada lima tahun terakhir ada peningkatan, pada awalnya di tahun 2016 sebesar 70%, kemudian di tahun 2020 menjadi 90% LKPD di seluruh Indonesia memperoleh opini WTP. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, tidak hanya berisikan opini tetapi juga mengungkapkan bahwa pada LKPD tahun 2020 mengungkapkan 6.809 temuan yang memuat 11.662 permasalahan mengenai sistem pengendalian intern (SPI) yang lemah dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan terdapat 5.367 permasalahan kelemahan SPI dan sisanya termasuk dalam kelemahan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. 2 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2021

Permasalahan SPI	Jumlah Permasalahan	Persentase (%)
Adanya kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.699	32%
Struktur dalam pengendalian intern	1.170	22%
Adanya kelemahan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.498	46%

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 (data diolah penulis)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diantaranya terdapat 32% (1.699) permasalahan mengenai lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 22% (1.170) termasuk dalam permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern, dan 46% (2.498) mengenai permasalahan lemahnya sistem pengendalian dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja.

Terkait dengan laporan keuangan organisasi sektor publik, hal tersebut merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi *stakeholder* sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik

adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemui, hal tersebut secara tidak langsung meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peneliti memilih untuk menilik variabel sistem pengendalian intern karena berdasarkan permasalahan awal yang ditemukan yaitu mengenai penyerapan anggaran Kota Bandung yang belum optimal. Salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran yaitu karena ditemukan penerapan sistem pengendalian intern yang lemah. Adanya ketidakefektifan dalam penyerapan anggaran secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bandung masih rendah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara SPIP dengan kinerja manajerial. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaporan

keuangan pemerintah Kota Bandung. Pengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Adanya penyerapan realisasi pada anggaran belanja yang belum optimal hingga mencapai 100% serta adanya selisih lebih antara anggaran dengan realisasinya.
2. Adanya penerapan sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia yang lemah menyebabkan penyerapan anggaran kurang optimal.
3. Adanya permasalahan-permasalahan SPI (Sistem Pengendalian Intern) pada hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2021.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka peneliti mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh penilaian risiko terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?

5. Bagaimana pengaruh pemantauan/monitoring pengendalian intern terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?
6. Bagaimana pengaruh secara simultan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi pengaruh penilaian risiko terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Mengidentifikasi pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
4. Mengidentifikasi pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
5. Mengidentifikasi pengaruh pemantauan terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
6. Mengidentifikasi pengaruh secara simultan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan akan mempunyai manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Besar harapan peneliti dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan bahan acuan untuk semua orang terutama bagi peneliti serta mengetahui dan memahami pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini membantu peneliti mendapatkan gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, memberikan pengetahuan, menambah wawasan keilmuan, serta mengimplementasikannya dalam salah satu karya tulis ilmiah ini. Khususnya menambah wawasan mengenai sistem pengendalian intern dengan dikaitkannya kinerja manajerial pada organisasi publik.

b. Bagi Instansi

Diharapkan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi masukan, bahan peninjauan, serta evaluasi bagi Badan Keuangan Aset Daerah Kota Bandung sebagai rekonstruksi dan upaya dalam meningkatkan kinerja manajerial pada instansi terkait pada tahun selanjutnya.

c. Bagi Akademis

Besar harapan peneliti bahwa dengan pengkajian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pandangan yang membacanya, juga dapat menjadi bahan referensi pada peneliti selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Pemerintah sebagai entitas pelapor harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Laporan keuangan berisikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi penyajian dari kualitas laporan, maka semakin membuktikan pandangan tentang kinerja keuangan perusahaan oleh pihak luar atau eksternal.

Berdasarkan laporan keuangan Kota Bandung, selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2021 realisasi anggaran Kota Bandung masih belum optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bandung masih rendah. Kinerja manajerial pada suatu organisasi publik dapat dipengaruhi salah satunya oleh sistem pengendalian intern. Adapun implementasi sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kinerja manajerial dapat diketahui dengan mengukur berdasarkan pada unsur-unsur ataupun dimensi-dimensi yang terdapat dalam SPIP. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern dalam pemerintahan memiliki beberapa komponen diantaranya (Mahmudi, 2019):

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam menerapkan sistem pengendalian intern pada lingkungan kerjanya, unsur ini menjadi unsur unsur yang penting. Dimana hal tersebut menjadi dasar dalam menumbuhkan karakter yang positif serta mendukung.

2. Penilaian Risiko

Unsur ini terdiri dari aktivitas penetapan tujuan instansi, melakukan identifikasi risiko baik yang bersumber dari luar maupun dalam. Kemudian dilakukannya analisis terhadap risiko tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya pada tujuan dan sasaran pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Dalam unsur ini prosedur dan kebijakan dalam membantu memastikan bahwa instruksi dari kepala instansi dilaksanakan dalam rangka untuk meminimalisir tingkat risiko. Dimana risiko tersebut sebelumnya telah diidentifikasi terlebih dahulu pada tahap penilaian risiko.

4. Informasi dan Komunikasi

Pada unsur ini sistem informasi dapat menghasilkan laporan, aktivitas usaha, keuangan, serta informasi yang layak untuk membolehkan terlaksananya pelaksanaan serta pemantauan aktivitas di instansi pemerintahan. Sedangkan dalam komunikasi. Seluruh karyawan dituntut harus memahami kedudukan masing-masing dalam sistem pengendalian internal tersebut serta memahami kaitannya pada tiap individu.

5. Pemantauan/Monitoring Pengendalian Intern

Kegiatan pemantauan ini wajib untuk dilaksanakan oleh pimpinan instansi terkait. Dimana dalam pelaksanaannya adanya kelanjutan pertimbangan atas hasil pemeriksaan serta tinjauan lainnya. Adapun kegiatan pemantauan ini dapat dilaksanakan melalui pemantauan secara berkala atau berkelanjutan ataupun dapat dilakukan dengan evaluasi terpisah.

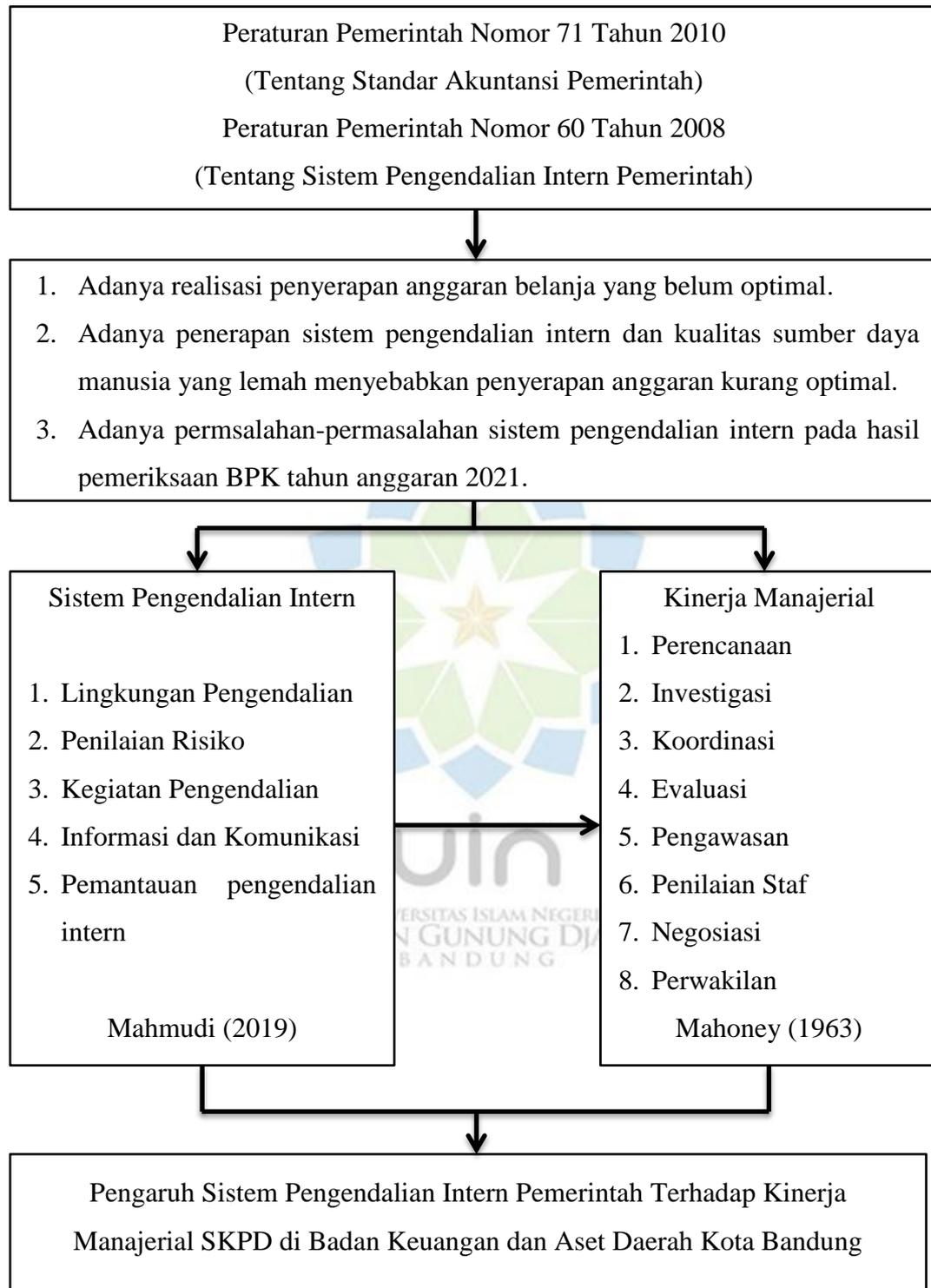
Kinerja manajerial menurut Mahoney (1963) yaitu kinerja individu dalam aktivitas manajemen, diantaranya terdiri dari proses perencanaan, kemudian dilakukannya investigasi, setelah itu koordinasi, evaluasi, dilakukannya pengawasan, aturan staf, kesepakatan, dan terakhir yaitu perwakilan (Afrida, 2013).

Hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kinerja manajerial salah satunya terdapat dalam teori agensi. Dimana menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan dalam teori agensi sebagai kontrak antara satu atau lebih principal yang mengharuskan agen untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (Putri & Halmawati, 2022). Kaitannya antara teori keagenan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terlihat dalam pengimplementasian sistem pengendalian internal, dimana mengharuskan sebagai agen maka pemerintah memiliki tanggung jawab atas kinerjanya. Kinerja manajerial pada SKPD dapat ditingkatkan salah satunya yaitu dengan pengimplementasian sistem pengendalian intern yang baik. Karena baiknya pengimplementasian sistem pengendalian intern, dapat mempengaruhi pada

pencapaian kinerja pemerintahan. Demikian seluruh proses dari sistem pengendalian intern bisa memberikan sebuah jaminan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan indikator dan telah terlaksana secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dari pengimplementasian sistem pengendalian intern yaitu untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara sistem pengendalian intern dengan kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dapat digambarkan seperti model di bawah ini:





Sumber: Data diolah penulis (2023)

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu sebuah anggapan dasar terhadap masalah yang memiliki sifat praduga karena masih perlu diuji kebenarannya, dimana kebenaran tersebut akan diuji dengan data yang terkumpul melalui penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian, berikut merupakan beberapa hipotesis yang akan diuji:

1. H_0 : Tidak adanya pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

H_1 : Adanya pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

2. H_0 : Tidak adanya pengaruh signifikan antara penilaian risiko terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

H_1 : Adanya pengaruh signifikan antara penilaian risiko terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

3. H_0 : Tidak adanya pengaruh signifikan antara kegiatan pengendalian terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

H_1 : Adanya pengaruh signifikan antara kegiatan pengendalian terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

4. H_0 : Tidak adanya pengaruh signifikan antara informasi dan komunikasi terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

H_1 : Adanya pengaruh signifikan antara informasi dan komunikasi terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

5. H_0 : Tidak adanya pengaruh signifikan antara pemantauan terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

H_1 : Adanya pengaruh signifikan antara pemantauan terhadap kinerja manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

6. H_0 : Tidak adanya pengaruh secara simultan antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

H_1 : Adanya pengaruh secara simultan antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.